

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam gambaran umum tentang Jepang, Jepang merupakan negara *Kekaisaran* dengan *Kaisar* sebagai pemimpin pemerintahan. Namun demikian, kepala pemerintahan di Jepang tidak selalu dipimpin oleh seorang *Kaisar*, karena sekarang pun Jepang dipimpin oleh seorang perdana menteri, bahkan pernah juga dipimpin oleh seorang *Seii Tai Shogun* (Panglima Jendral) selama 3 zaman. Zaman itu, yaitu zaman *Kamakura*, zaman *Muromachi* dan zaman *Tokugawa* yang dikenal dengan pemerintahan *Bakufu*.

Zaman *Kamakura* di mana pemerintahan militer pertama dijalankan di Jepang yang dikenal dengan nama pemerintahan *Kamakura*. Pemerintahan *Kamakura* terbentuk setelah adanya pertikaian antara keluarga *Taira* dan keluarga *Minamoto*. Mereka membantu pertikaian keluarga *Kaisar* dengan keluarga *Fujiwara*. Pihak *Kaisar* meminta bantuan pada keluarga *Taira*, sedangkan keluarga *Fujiwara* meminta bantuan pada keluarga *Minamoto*.

Pada awalnya, keluarga *Taira* dapat mengalahkan *Minamoto* dan *Fujiwara* pada 1159, namun pada 1183 keluarga *Minamoto* di bawah pimpinan Yoritomo dapat mengalahkan keluarga *Taira* untuk selamanya, dan kekuasaan politik dipegang oleh keluarga *Minamoto* di *Kamakura* di mana kekuasaan politik dikendalikan oleh *Shogun* (Taro Sakamoto, 1980 : 22).

Setelah pemerintahan *Kamakura* jatuh, zaman pun berganti menjadi zaman *Muromachi*. Pada zaman ini pemerintahan masih dikendalikan oleh seorang *Shogun*, dan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan *Muromachi*. Ada pun zaman *Tokugawa* adalah zaman yang mengakhiri kepemimpinan seorang *Shogun*, di mana kekuasaan dikembalikan kepada *Kaisar* pada 1867 setelah berkuasa dari tahun 1603. Pengembalian kekuasaan kepada *Kaisar* awalnya disebabkan oleh kebijakan pada zaman itu yang membuat masyarakat Jepang memberontak dan terjadi kudeta terhadap *Shogun*.

*Shogun* saat itu telah membawa kekacauan dengan adanya banyak orang asing di Jepang yang dianggap membawa masalah dalam masyarakat Jepang. Keberadaan orang asing di Jepang yakni setelah Jepang membuka negaranya pada 1854 dari politik *sakoku* atau penutupan negara Jepang yang berlangsung sejak tahun 1639. Penutupan negara saat itu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bangsa Jepang akan adanya *imperialisme* oleh bangsa Eropa yang membawa misinya ke Jepang yaitu mencari kekayaan, penyebaran agama dan mencari kejayaan. Selain itu, Jepang tidak ingin agama Kristen masuk ke Jepang dan tidak ingin dipengaruhi oleh budaya asing.

Ada pun pembukaan negara Jepang pada 1854 dikarenakan tidak berdayanya *Shogun Tokugawa* terhadap tembakan meriam-meriam dari kapal-kapal perang hitam *kurofune* pada 1853 yang meminta masuk ke Jepang dan baru berhasil melalui perjanjian yang ditandatangani pada Maret 1854. Hal ini mendorong elemen-elemen kekuatan seperti para *Daimyo* (gelar bangsawan di Jepang), tokoh masyarakat dan para *Samurai* muda untuk mempertanyakan hak *Shogun Tokugawa* dalam memonopoli kekuatan nasional. Akibatnya timbul serangkaian 'perkembangan' (pemberontakan) dan protes rakyat yang memuncak pada runtuhnya seluruh sistem *Bakufu* atau pemerintahan militer pada 1867. Peristiwa ini dikenal dengan nama Restorasi *Kekaisaran* (Restorasi *Meiji*) yang isinya mengakhiri peran *Shogun Tokugawa* sebagai penguasa *feodal* dengan memulihkan kekuasaan politik pada *Kaisar*. Kekuasaan politik *Kaisar* ini diundangkan dalam Undang Undang *Meiji* pada 1890 yang intinya *Kaisar* Jepang memegang kekuasaan yang mutlak dalam pemerintahan baru, yaitu Pemerintahan *Meiji*. Zaman ini disebut juga dengan zaman *Meiji*.

Perkembangan selanjutnya, ternyata meski sistem *Bakufu* telah runtuh dan kekuasaan sudah kembali pada *Kaisar* di mana *Kaisar* memegang kekuasaan mutlak, namun akibat pembukaan pelabuhan-pelabuhan Jepang secara paksa oleh kekuatan asing, bagi para *Samurai* dan sebagian besar orang Jepang jelas merupakan suatu penghinaan dan sangat menjatuhkan martabat dan kedaulatan bangsa. Selain itu, hal tersebut merupakan ancaman bagi eksistensi bangsa Jepang yang harus dihadapi dengan cara-cara yang tepat.

Dalam persepsi para *Samurai*, peradaban Barat ternyata telah mengalahkan peradaban Timur. Peradaban Barat dengan ujung tombak industri senjata, ternyata telah sangat berhasil menundukkan negara-negara terbelakang khususnya di Asia dan Afrika. Kondisi ini akhirnya melahirkan kesadaran bersama, bahwa senjata Barat harus dilawan dengan senjata Barat, dan begitu pula dalam bidang ekonomi dan industri (dalam hal ini penerapan ekonomi kapitalis), maka untuk merealisasikan semangat tersebut, pemerintah baru *Meiji* menempatkan pembangunan kekuatan militer sebagai prioritas bangsa Jepang ketika itu. Hal ini seperti yang tercantum dalam salah satu perintah *Kaisar*, yaitu membangun Angkatan Perang yang kuat mencontoh Inggris dan Angkatan Daratnya mempelajari Angkatan Darat Jerman.

Selanjutnya, para *Samurai* dan sebagian besar orang Jepang menyadari bahwa betapa pentingnya industri sebagai sumber kemampuan sebuah negara untuk mempertahankan diri, melahirkan semangat nasional di dalam kehidupan Jepang, per kaya negeri dan perkuat angkatan perang yang artinya kebutuhan akan angkatan perang berdasarkan organisasi dan teknologi Barat. Untuk itulah prioritas dan sasaran utama pemerintah *Meiji* adalah membangun kekuatan militer, akibatnya militer mempunyai kedudukan dan pengaruh kuat dalam pemerintahan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian terkait Dominasi militer pada pemerintahan *Meiji*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan diakhirinya pemerintah militer *Keshogunan Tokugawa* adalah untuk mengembalikan kekuasaan kepada *Kaisar*. Namun demikian, pemerintahan *Meiji* sebagai pemerintahan baru dengan *Kaisar* sebagai pemegang kekuasaan yang mutlak, seolah membiarkan berkembangnya militer yang ditujukan untuk berperang.

### C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah dominasi militer pada masa pemerintahan *Meiji*.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terjadinya dominasi militer terhadap pemerintah *Meiji*?
2. Bagaimana peran militer Jepang pada masa pemerintahan *Meiji* terhadap Perang Dunia II?
3. Bagaimana dampak dominasi militer pasca Perang Dunia II?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Terjadinya dominasi militer terhadap pemerintah *Meiji*.
2. Peran militer Jepang pada masa pemerintahan *Meiji* terhadap Perang Dunia II.
3. Dampak dominasi militer pasca Perang Dunia II.

### F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, di mana data yang diperoleh berasal dari buku dari berbagai perpustakaan, jurnal dan internet. Proses penelitian diawali dengan membaca berbagai data dari berbagai sumber, kemudian dideskripsikan dan dianalisa.

## G. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah:

### 1. Dominasi

Mosca dalam Sastroatmodjo (1995) menyatakan: “Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk. Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama”. Pandangan ini menekankan, bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas pertama yang menguasai fungsi politik, yakni monopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil hasilnya. Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama dengan cara-cara tertentu (Sastroatmodjo : 1995). Jadi dominasi itu adalah orang-orang yang tergabung dalam sekelompok kecil yang menjalankan kebijakan politik dan memonopoli kekuasaan.

### 2. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:849), “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” Sementara itu, Surakhmad (1982:7) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya. Jadi pengaruh adalah hasil dari sikap yang dilakukan

oleh seseorang atau kelompok dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melakukan dan menjalankan kewajibannya terhadap pihak pemintanya untuk menjalankan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan dan pengaruh mempunyai hubungan yang sangat erat. Yaitu apabila seseorang mempunyai kekuasaan maka dia dapat mempengaruhi pihak lain untuk menjalankan kehendaknya, seperti apa yang diinginkan oleh ‘penguasa’ tersebut dan ‘pengaruh’ apa yang mungkin timbul (<http://pengertian-menurut.blogspot.sg/2015/09/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli.html>).

### 3. Militer

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk tempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplin tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata. (<http://digilib.unila.ac.id/9251/3/BAB%20II.pdf>).

Jenis-jenis orientasi militer berbeda di setiap negara, tergantung bagaimana pihak militer dalam pemerintahan, selain itu juga tergantung sistem politik yang dianut negara tersebut. Setiap negara mempunyai karakteristik sendiri terhadap tipe-tipe orientasi militernya, menurut Amos Perlmutter ada tiga jenis orientasi militer yang timbul di negara modern, masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang dilembagakan, yakni:

#### a. Militer Profesional

Militer profesional adalah militer yang memegang teguh fungsi pertahanan-keamanan, mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata, setia pada negara bukan pada pemerintah atau komandan, punya jiwa korsa yang kuat, dan punya etika militer yang kuat. Etika ini mementingkan

ketertiban, hirarkhi dan pembagian tugas serta pengakuan atas *nation-state* sebagai bentuk tertinggi organisasi politik.

#### **b. Militer *Praetorian***

Militer *praetorian* adalah militer yang lebih suka berpolitik atau menjalankan aktivitas ekonomi, ketimbang mengurus pertahanan. Militer aktif yang menjadi menteri, parlemen, kepala daerah atau menjalankan bisnis adalah militer *praetorian*, alias militer yang tidak punya etika profesional.

Militer *praetorian* melakukan politisasi di seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya, bahkan akhir dari politisasi yang dilakukannya menciptakan atau membangun masyarakat *praetorianisme*, sehingga lembaga-lembaga politik menjadi tidak efektif baik dalam menyikapi perubahan ataupun dalam upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan serta pada tindakan-tindakan politik.

*Praetorian* yang *oligarkis* adalah kaum militer bekerja sama dengan pemilik tanah yang luas dan pemimpin-pemimpin agama, dan di luar mereka hampir-hampir tidak ada organisasi yang diperbolehkan berkembang. Ada pun mengenai *pretorian* radikal sering lahir dari *praetorian* yang *oligarkis*, pelopornya adalah perwira-perwira reformis dan nasionalitis yang berasal dari golongan menengah, yang mendambakan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Aliansi kaum militer *pretorian* radikal dibangun dengan kelompok-kelompok profesi dan intelektual serta kadang dengan kaum buruh. *Pretorian* radikal ini yang melahirkan pemerintah korporatis.

#### **c. Militer *Revolusioner Profesional***

Militer *revolusioner* profesional mempunyai pola intervensi ilegal, namun tidak seperti tentara *pretorian* yang melalui kudeta militer atau melalui kerja sama dengan kelompok-kelompok lain sebelum dan selama proses intervensi secara sembunyi, dan dilancarkan untuk mendukung

kelompok *revolusioner* yang sudah ada yang secara terang-terangan berusaha mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dan dukungan kelembagaan secara besar-besaran.

Tentara *revolusioner pretorian* bukanlah hasil dari keahlian militer, melainkan pengabdian revolusi dan mendapatkan dukungan partai. Tentara *revolusioner* tidak mengenal adanya pendaftaran dan penerimaan perwira, melainkan kesadaran sendiri untuk ikut bergabung membela kepentingan revolusi. Oleh karena itu tentara revolusi tidak ada pembatasan jumlah tentaranya (<http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html>).

Jadi militer itu terbagi menjadi tiga jenis yaitu militer profesional, militer pretorian, dan militer revolusioner pretorian. Militer profesional lebih mengarah ke pertahanan negara, militer pretorian lebih ke arah politik negara, dan revolusioner pretorian adalah rakyat biasa yang mendapatkan dukungan dari partai politik untuk berpartisipasi dalam membela kepentingan negara untuk melakukan revolusi.

#### **4. Pemerintahan**

Pemerintahan secara *etimologis* berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memikirkan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan (Ramlan Surbakti, 1992:167). Sementara itu istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau segala usaha yang terorganisasi, bersumber pada

kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, yang satu sama lain berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, pemerintah berarti seluruh tugas dan kewenangan negara (Ramlan Surbakti, 1992 : 168).

Berdasarkan tiga aspek di atas pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara). Yang melaksanakan tugas dan kewenangan negara ialah pemerintah. Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara, perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit.

Pemerintah dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Demikian pula dengan pengertian pemerintah dalam arti luas berarti seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit menyangkut aparat eksekutif, yaitu kepala pemerintahan dan kabinetnya (Ramlan Surbakti, 1992 : 169).

Jadi pemerintah itu adalah lembaga yang menaungi suatu negara yang mempunyai kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara.

#### **H. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bagi penulis dapat menambah wawasan tentang sejarah Jepang khususnya sejak pemerintahan *Keshogunan Tokugawa* sampai pada pemerintahan *Meiji*, di mana dominasi militer pada masa itu sangat besar. Kemudian diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pembaca, yaitu selain dapat menambah wawasan, juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## I. Sistematika Penulisan

**Bab I**, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, landasan teori dan sistematika penulisan.

**Bab II**, merupakan bab yang memaparkan tentang perubahan pemerintahan dari *Keshogunan Tokugawa* menjadi Pemerintahan *Meiji*.

**Bab III**, merupakan bab pembahasan tentang dominasi militer pada pemerintahan *Meiji*, serta dampak dari dominasi tersebut

**Bab IV**, kesimpulan.

